

ABSTRAK

Pajak merupakan penerimaan yang strategis bagi Negara karena itu salah satu upaya untuk mengamankannya dengan melalui penegakan hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan pajak, maka penerapan sanksi pidana diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga ketaatan Wajib Pajak dan mengamankan pendapatan Negara dari sektor pajak.

Tesis ini berjudul Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di bidang Perpajakan (Studi Kasus Perkara Asian Agri Group Atas Nama Suwir Laut) dengan pembahasan seperti dijabarkan pada permasalahan : 1. Landasan Hukum Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan dan 2. Ratio Decidendi Yang Mendasari Perbedaan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Hakim Mahkamah Agung Pada Perkara Tindak Pidana Perpajakan Dalam Kasus Asian Agri Group Atas Nama Suwir Laut, melalui tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Salah satu penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang berhasil adalah penanganan kasus Asian Agri Group atas nama Suwir Laut. Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Suwir Laut adalah merupakan tindak pidana perpajakan karena apa yang dilakukannya adalah dikehendaki oleh terdakwa dan berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Mahkamah Agung RI menerapkan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya kendatipun korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan.

Keyword: Penyidikan, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penghindaran Pajak, dan Penghasilan.

ABSTRACT

An acceptance of strategic tax for the state, because it is one of the efforts to secure it with through law enforcement efforts both administrative and criminal attempts. As one law enforcement efforts against tax irregularities, the application of criminal sanctions of expected to be one of the means to maintain taxpayer compliance and securing state revenues from the tax sector.

This thesis titled criminal offense and criminal liability in the field of taxation (Asian Agri Group case study case on behalf of Suwir Laut) with discussion as elaborated on issue : 1. What legal basis for criminal investigation in the field of taxation and 2. What the underlying ratio decidendi difference Jakarta district court judge's ruling center, high court judge DKI Jakarta with supreme court judges in criminal cases of tax in the case of Asian Agri Group on behalf of Suwir Laut, through the type of a normative juridical research with conceptual approach and case approach.

One of the law enforcement criminal offenses in the field of taxation that works is handling the case a Asian Agri Group on behalf of Suwir Laut. RI Supreme Court decision in numbers : 2239/PID.SUS/2012 datet 18 December 2012, it can be understanding that the acts committed by the defendant Suwir Laut is a tax crime because what it does is desired by the accused and based on business interests 14 (fourteen) represents corporation to understate the amount of taxes to be paid. RI Supreme Court apply to corporate criminal liability for the actions or behavior of the accused as the personification of the corporation who represent the corporation despite a role in the case a quo was not indicted.

Key words : *Criminal investigation and criminal liability in the field of taxation, evasion of income tax.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Upaya Paksa perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 ;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ;
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara;
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

DAFTAR SURAT DAKWAAN DAN PUTUSAN PERADILAN

Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-2269/JKT.PST/12/2010 tanggal 30 Desember 2010;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2011;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 241/PID/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.

